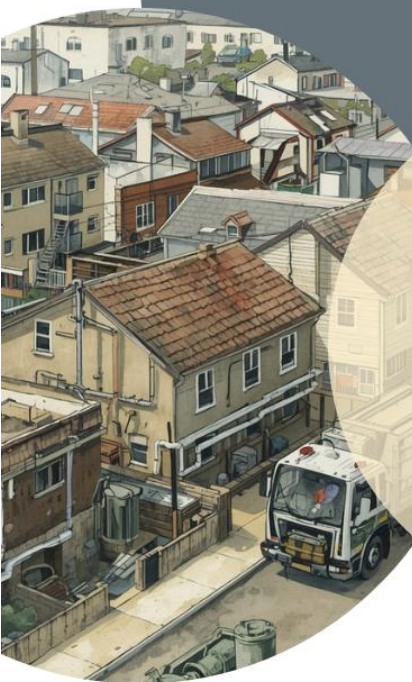




KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA



LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

BP3KP SUMATERA V

TAHUN 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera V

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara transparan, sekaligus memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri PKP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP dan beberapa regulasi teknis lainnya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015, guna mendorong akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Laporan ini memuat capaian kinerja BP3KP Sumatera V sepanjang Tahun Anggaran 2025 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh data berasal dari kompilasi kegiatan Balai selama tahun berjalan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajiannya, oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Sebagai penutup, kami segenap jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja kami. Semoga laporan ini menjadi gambaran akuntabilitas kinerja sekaligus acuan untuk perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan.

Palembang, Januari 2026



Ir. Yustin Patria Primordia, S.T., M.Si.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera V



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

Berikut adalah ikhtisar kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025:

A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029, BP3KP Sumatera V menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - 1) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - 2) persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - 3) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - 4) persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - 5) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - 6) persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;

- 7) persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - 8) persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen; dan
 - 9) persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- b. Tujuan kedua yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola BP3KP Sumatera V.

Adapun sasaran program BP3KP Sumatera V sebagai berikut:

- a. Meningkatnya hunian layak;
- b. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;
- c. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Sumatera V.

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap indikator kuantitatif dan kualitatif pada dua program utama dalam Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Secara umum, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang **Sangat Baik** dengan persentase capaian fisik sebesar **99,98%**. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen kuat dari Kepala Balai, jajaran Kasatker/Kepala Seksi/Kasubbag/PPK, dukungan Direktorat Jenderal, serta kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Mitra Pemerintah.

C. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan BP3KP Sumatera V tahun 2025 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut adalah ringkasan realisasinya:

1. Pagu Anggaran: Rp 3,346,128,000
2. Realisasi Anggaran: Rp 3,077,923,282 (91,98%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tugas dan Fungsi	4
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1.3.1. Struktur Organisasi	5
1.3.2. Sumber Daya Manusia (SDM).....	6
1.4. Sarana dan Prasarana.....	11
1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik	11
1.4.2. Teknologi Informasi.....	12
1.5. Isu Strategis	13
1.6. Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Rencana Strategis	17
2.1.1. Tujuan	17
2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi	18
2.1.3. Sasaran Program.....	19
2.1.4. Program dan Kegiatan	22
2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	26
2.2.1. Perjanjian Kinerja.....	26
2.2.2. Kronologi Perubahan PK DIPA Sekretariat Jenderal	31
2.2.3. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	32
2.2.4. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	34
2.2.5. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	35
2.2.6. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	36
2.3. Metode Pengukuran Kinerja	37
2.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	45
3.2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, Program Prioritas, Prioritas Nasional, Pantauan Kantor Staf Presiden	48
3.2.1. Capaian Kinerja terhadap PK Sekretariat Jenderal.....	48

3.2.2.	Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	49
3.2.3.	Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	50
3.2.4.	Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	51
3.2.5.	Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	53
3.3.	Analisis Perbandingan Kinerja.....	53
3.4.	Analisis Realisasi Anggaran	59
3.4.1.	Realisasi Anggaran pada Unit Kerja BP3KP Sumatera V.....	59
3.4.2.	Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	60
3.4.3.	Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	61
3.4.4.	Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	62
3.4.5.	Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Sekretariat Jenderal.....	62
3.5.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
3.6.	Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja	65
3.7.	Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan	68
	BAB IV PENUTUP	71
4.1.	Simpulan Umum	71
4.1.1.	Faktor Pendukung Keberhasilan	72
4.1.2.	Faktor Penyebab Kegagalan	72
4.2.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)	5
Gambar 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan	8
Gambar 1.4. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 1.5. Jumlah SDM Berdasarkan Usia dan Generasi.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah SDM Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.4. Jumlah SDM Berdasarkan Usia dan Generasi	10
Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana BP3KP Sumatera V Tahun 2025.....	11
Tabel 1.6. Data Teknologi Informasi BP3KP Sumatera V TA 2025	12
Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan BP3KP Sumatera V	23
Tabel 2. 2 Kronologi Perubahan PK DIPA Sekretariat Jenderal.....	31
Tabel 2. 3 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Kawasan Permukiman	32
Tabel 2. 4 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	34
Tabel 2. 5 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	35
Tabel 2. 6 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....	37
Tabel 3. 1 Target Kinerja Dukungan Manajemen di Balai P2P Sumatera V TA 2023.....	45
Tabel 3. 2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2023 BP2P Sumatera V.....	46
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Sekretariat Jenderal ...	49
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	49
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	51
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	52
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	53
Tabel 3. 8 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2021-2025.....	54

Tabel 3. 9 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2025	56
Tabel 3. 10 Perbandingan Kinerja BP3KP Sumatera V dengan BP3KP Sumatera III TA 2025	57
Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	60
Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	60
Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	61
Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	62
Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	63
Tabel 3. 16 Rasio Penugasan di BP3KP Sumatera V	63
Tabel 3. 17 Analisis Kebutuhan Ruang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V.....	64
Tabel 3. 18 Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V yang Mencapai 100%	68
Tabel 3. 19 Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V yang Tidak Mencapai 100% ...	69

Bab I
Bab I
Bab I

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V memiliki mandat strategis sebagai unit pelaksana teknis di daerah dalam mendukung terwujudnya hunian layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun pesisir. Tugas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang mempunyai peran sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Selain itu, pelaksanaan tugas BP3KP Sumatera V juga diarahkan untuk mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, khususnya dalam upaya pengurangan *backlog* perumahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di tingkat regional.

Selama Tahun Anggaran 2025, BP3KP Sumatera V melaksanakan berbagai program dan kegiatan, antara lain pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Masyarakat, pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, serta Program Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, BP3KP Sumatera V dibantu oleh Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman di masing-masing Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, serta Lampung yang secara konsisten berkontribusi untuk mendukung tujuan dari program dan kegiatan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BP3KP Sumatera V Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan peningkatan akuntabilitas kinerja dan berorientasi hasil/*outcome* serta menjadi alat evaluasi kinerja organisasi, sekaligus wujud komitmen Balai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025 disusun berdasarkan aturan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus.
2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko No 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

Melalui dokumen LAKIP ini, diharapkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memperoleh gambaran yang objektif terhadap capaian kinerja BP3KP Sumatera V selama tahun 2025 serta masukan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Sumatera V mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Selanjutnya dalam menjalankan tugas tersebut, BP3KP Sumatera V memiliki fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuaapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BP3KP Sumatera V didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

BP3KP memiliki beberapa unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah Subbagian Umum dan Tata Usaha yang menangani tugas administratif dan kesekretariatan. Selain itu, terdapat dua seksi teknis yang membawahi pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja masing-masing, yaitu Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan Seksi Pelaksanaan Wilayah II. Kedua seksi ini menjalankan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah yang telah ditentukan.

Di bawah struktur tersebut juga terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis maupun administratif sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jabatan ini memainkan peran penting dalam operasionalisasi tugas-tugas harian di lapangan maupun di kantor, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pelaporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai. Secara keseluruhan, struktur ini menggambarkan sistem koordinasi dan komando yang terintegrasi antara tingkat pusat dan pelaksana teknis di daerah untuk memastikan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan secara efisien dan efektif

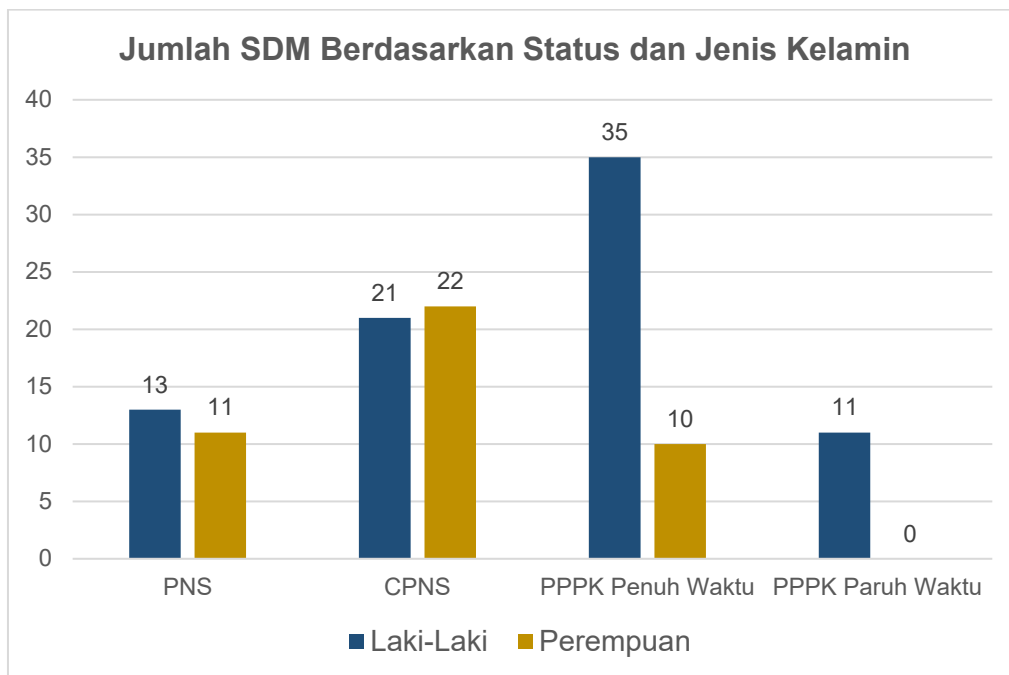
1.3.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi, institusi, maupun unit kerja. SDM adalah individu-individu produktif yang berperan sebagai penggerak, pemikir, serta perencana dalam upaya mencapai tujuan unit kerja. Tanpa dukungan SDM yang memadai, tujuan dan sasaran organisasi akan sulit dicapai secara optimal.

Demikian pula halnya dengan BP3KP Sumatera V, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada keberadaan dan kualitas SDM yang dimiliki. SDM yang ada di BP3KP Sumatera V menjadi faktor strategis dalam mendukung pencapaian program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Adapun rincian SDM pada BP3KP Sumatera V dapat dijabarkan sebagai berikut ini.

a. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Total pegawai di lingkungan BP3KP Sumatera V adalah 34 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 6 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 15 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) penuh waktu sejumlah 11 orang serta PPPK paruh waktu sebanyak 2 orang. Apabila dibagi berdasarkan jenis kelamin secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 berikut ini.



Gambar 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

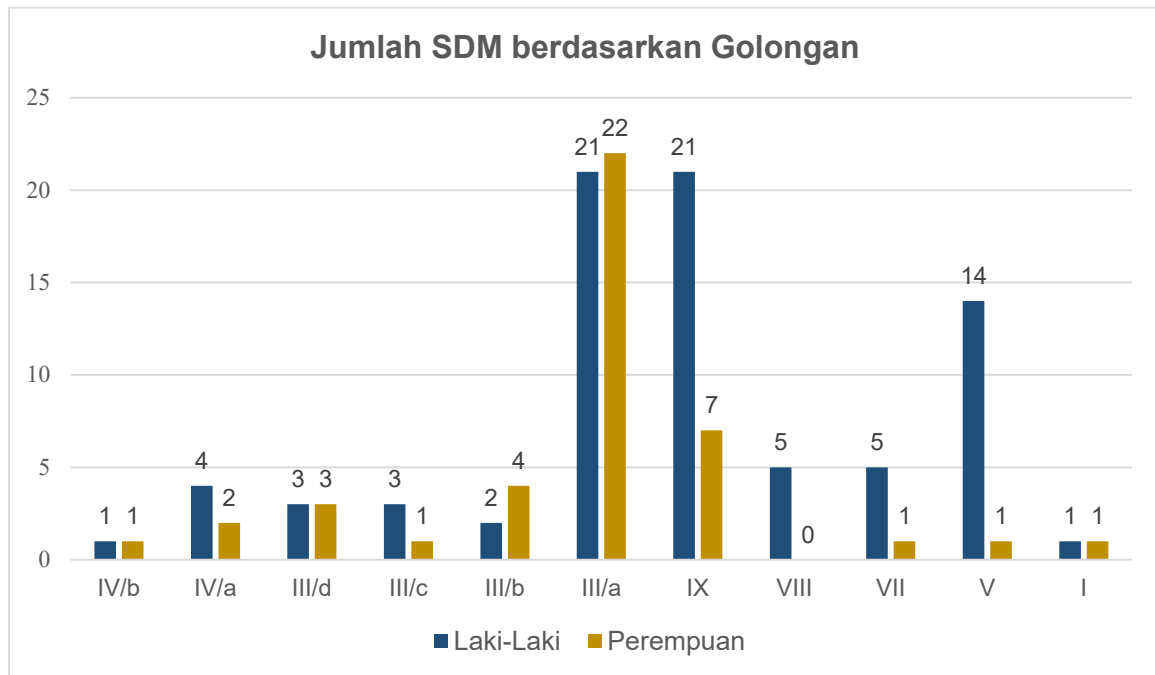
Tabel 1.1. Jumlah SDM Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin

Status	Laki-Laki	Perempuan	Total
PNS	13	11	24
CPNS	21	22	43
PPPK Penuh Waktu	35	10	45
PPPK Paruh Waktu	11	0	11
Total	80	43	123

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

b. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

Total pegawai berdasarkan golongan di BP3KP Sumatera V dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan Tabel 1.2 sebagai berikut.



Gambar 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

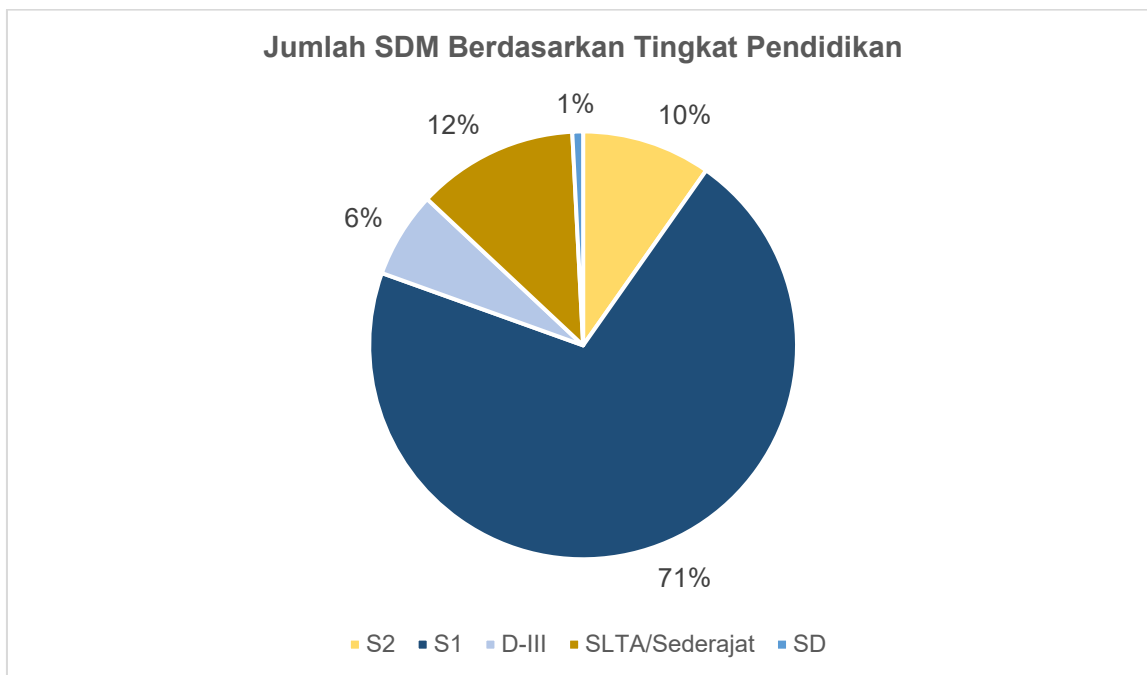
Tabel 1.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

Status	Laki-Laki	Perempuan	Total
IV/b	1	1	2
IV/a	4	2	6
III/d	3	3	6
III/c	3	1	4
III/b	2	4	6
III/a	21	22	43
IX	21	7	28
VIII	5	0	5
VII	5	1	6
V	14	1	15
I	1	1	2
Total	80	43	123

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

c. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Berdasarkan Pendidikan dan Usia di BP3KP Sumatera V dibagi menjadi seperti pada Gambar 1.5, Tabel 1.4, Gambar 1.6, dan Tabel 1.5 sebagai berikut.



Gambar 1.4. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

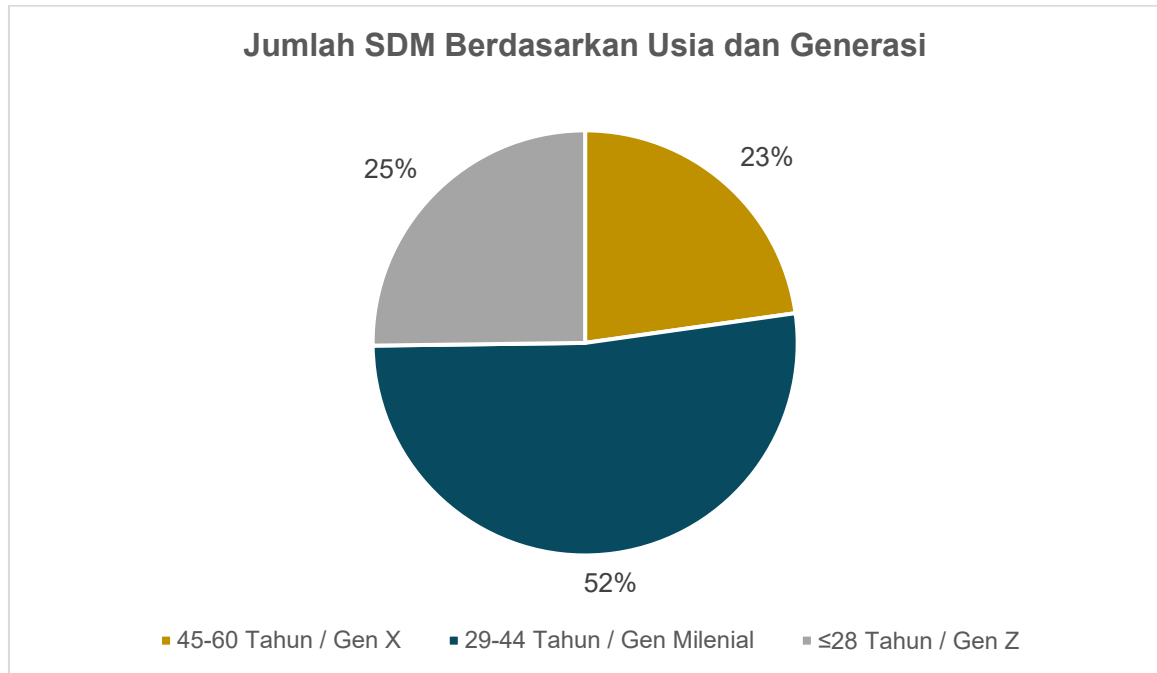
Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

Tabel 1.3. Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status	Laki-Laki	Perempuan	Total
S2	8	4	12
S1	51	36	87
D-III	7	1	8
SLTA/Sederajat	14	1	15
SD	0	1	1
Total	80	43	123

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

Berdasarkan Gambar 1.5 dan Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa BP3KP Sumatera V memiliki 12 orang dengan latar belakang pendidikan S2 (10%), 87 orang dengan latar belakang pendidikan S1 (71%), 8 orang dengan latar pendidikan D-III (6%), 15 orang dengan latar pendidikan SLTA/ sederajat (12%), dan 1 orang dengan latar belakang pendidikan SD (1%).



Gambar 1.5. Jumlah SDM Berdasarkan Usia dan Generasi

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

Tabel 1.4. Jumlah SDM Berdasarkan Usia dan Generasi

Usia / Generasi	PNS	CPNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Total
45-60 Tahun / Gen X	14	-	7	7	28
29-44 Tahun / Gen Milenial	10	15	35	4	64
≤28 Tahun / Gen Z	-	28	3	-	31
Total	24	43	45	11	123

Sumber: Daftar Pegawai BP3KP Sumatera V

Berdasarkan Gambar 1.6 dan Tabel 1.5 dapat dilihat bahwa BP3KP Sumatera V memiliki lebih dari separuh dari keseluruhan pegawai generasi Generasi Milenial yakni sebanyak 64 orang (52%), diikuti pegawai Generasi Z sebanyak 31 orang (25%), dan pegawai Generasi X sebanyak 28 orang (23%).

1.4. Sarana dan Prasarana

Salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Sumatera V adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi tulang punggung operasional kerja, mulai dari fasilitas kantor, perangkat kerja, hingga sistem pendukung berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Balai.

1.4.1. Sarana dan Prasarana Fisik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasaran pada unit atau satuan kerja yang dianggarkan melalui anggaran negara, atau dalam hal ini melalui pembiayaan APBN, dimasukkan dalam daftar aset Barang Milik Negara (BMN) oleh unit atau satuan kerja masing-masing.

Di tahun 2025, dalam mendukung kinerja BP3KP Sumatera V terdapat 240 sarana dan prasarana dengan nilai Rp 1.094.528.000,-. Sarana dan prasarana ini terdiri dari peralatan kantor dan alat pengolah data (mesin) seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana BP3KP Sumatera V Tahun 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai (Rp)
3020104001	Sepeda Motor	1	Unit	33,520,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	15	Buah	43,093,000
3050104002	Lemari Kayu	11	Buah	37,026,000
3050104004	Rak Kayu	1	Buah	2,244,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	1	Buah	3,000,000
3050104007	Brankas	1	Buah	6,000,000
3050105007	CCTV – Camera Control Television System	2	Buah	22,810,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2	Buah	9,800,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	15,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	3	Buah	30,476,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Buah	2,244,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Meta	2	Buah	3,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	35	Buah	43,269,500

Kode	Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai (Rp)
3050201003	Kursi Besi/Metal	49	Buah	32,881,000
3050201004	Kursi Kayu	46	Buah	25,806,000
3050201005	Sice	5	Buah	16,607,000
3050201008	Meja Rapat	2	Buah	3,366,000
3050204001	Lemari Es	1	Buah	2,375,000
3050204004	A.C. Split	6	Buah	31,600,000
3050206002	Televisi	1	Buah	7,175,000
3050206008	Sound System	1	Buah	7,700,000
3050206020	Camera Video	1	Buah	1,683,000
3050206036	Dispenser	1	Buah	3,366,000
3050206058	Gordyin/Kray	7	Buah	6,058,780
3060102128	Camera Digital	1	Buah	17,875,000
3060102132	Video Conference	1	Buah	9,000,000
3060102167	Drone	1	Buah	23,943,000
3080108044	Lightweight Concrete Test Hammer	1	Buah	16,527,000
3100102001	PC Unit	4	Buah	47,675,000
3100102002	Laptop	17	Buah	296,417,720
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Buah	47,860,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Buah	23,130,000
8010101001	Software Komputer	1	Dummy	222,000,000
Jumlah		240	-	1,094,528,000

Sumber: Data BMN BP3KP Sumatera V Tahun 2025

1.4.2. Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP3KP Sumatera V juga menggunakan teknologi informasi sebagai alat dukung. Adapun teknologi informasi yang digunakan berupa aplikasi. Aplikasi yang digunakan oleh BP3KP Sumatera V, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.6. Data Teknologi Informasi BP3KP Sumatera V TA 2025

No	Nama Aplikasi	Keterangan
1	myPKP	Untuk mendata capaian terkini program dan renovasi rumah di wilayah Sumatera V, mengelola administrasi kepegawaian Kementerian PKP, serta mengelola Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI).

No	Nama Aplikasi	Keterangan
3	E-Office	Untuk melakukan persuratan di lingkungan Kementerian PKP.
2	SIBARU	Untuk mengecek usulan kegiatan/bantuan dari Pemerintah Daerah serta melakukan verifikasi berkas yang telah di- <i>upload</i> .

Sumber: Data Teknologi Informasi BP3KP Sumatera V Tahun 2025

1.5. Isu Strategis

Penyelenggaraan penyediaan perumahan merupakan suatu rangkaian kegiatan kompleks yang dalam pelaksanaannya akan banyak menemui hambatan dan tantangan. Di tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V terus memaksimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk dapat meraih hasil yang mendekati optimal. Adapun beberapa isu-isu strategis yang dihadapi Balai di tahun ini diantaranya:

- a. Pertumbuhan kebutuhan rumah saat ini cukup tinggi dan masih menyebabkan tingginya backlog perumahan baik kepemilikan maupun penghunian. Saat ini, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Selain itu, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mengenai jumlah rumah tetapi juga mutu atau kualitas rumah tersedia yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan;
- b. Keterjangkauan masyarakat pada rumah layak yang tersedia masih rendah terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum banyak sistem pembiayaan atau skema yang dapat memenuhi kebutuhan rumah terutama untuk MBR;
- c. Keterbatasan anggaran untuk bidang penyelenggaraan perumahan terutama yang bersumber dari APBN sangat terbatas. Dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah, diperlukan penguatan kolaborasi pembiayaan, inovasi skema investasi dan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan perumahan;

- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai yang menyebabkan beberapa orang harus mengerjakan pekerjaan di luar tugas pokok dan fungsinya; dan
- e. Minimnya peran Balai sebagai mediator di antara stakeholders untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini BP3KP banyak berperan dalam verifikasi, pengawasan, dan pengendalian penyediaan perumahan.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3KP Sumatera V disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum mengenai BP3KP Sumatera V, termasuk tugas dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Penyajian ini memberikan konteks awal mengenai kapasitas organisasi dan tantangan eksternal yang memengaruhi kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan perencanaan strategis berdasarkan Renstra BP3KP Sumatera V tahun 2025–2029, termasuk visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta strategi. Disampaikan pula ringkasan perjanjian kinerja (PK) tahun 2025, metode pengukuran kinerja yang digunakan, serta target-target kinerja yang hendak dicapai.

Bab III Akuntabilitas Kerja

Bab ini menyajikan hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja serta realisasi anggaran tahun 2025. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan mengenai capaian kinerja utama, perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, efisiensi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan data dan informasi, serta langkah-langkah peningkatan akuntabilitas.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat simpulan atas capaian kinerja yang telah diperoleh, faktor-faktor pendukung keberhasilan, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan kinerja BP3KP Sumatera V secara berkelanjutan.

Lampiran

Lampiran berisi dokumen pendukung laporan akuntabilitas kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, serta Dokumentasi Kegiatan.

Bab II
Bab II
Bab II

**Perencanaan
Kinerja**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2025, Balai dan Satker memiliki lebih dari 1 (satu) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan masing-masing jumlah DIPA yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Hingga akhir Tahun Anggaran 2025, BP3KP Sumatera V memiliki 5 (lima) DIPA.

2.1. Rencana Strategis

Pembahasan mengenai Rencana Strategis diambil dari dokumen Rencana Strategis 2025-2029 BP3KP Sumatera V yang meliputi Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi, Sasaran Program serta Program dan Kegiatan BP3KP Sumatera V.

2.1.1. Tujuan

Mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian PKP Tahun 2025–2029, BP3KP Sumatera V menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan sebagai berikut:

- c. Tujuan pertama yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”, dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - 1) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - 2) persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - 3) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - 4) persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - 5) persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;

- 6) persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - 7) persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - 8) persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - 9) persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni; dan
 - 10) persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.
- d. Tujuan kedua yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola”, dengan indikator tujuan dari tersebut yaitu persentase peningkatan tata kelola BP3KP Sumatera V.

2.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi lima unit organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta memperhatikan mandat fungsi balai sebagai unit pelaksana teknis, kondisi eksisting, dan kebutuhan wilayah kerja, kebijakan BP3KP Sumatera V dirumuskan untuk mendukung implementasi kebijakan nasional sebagai berikut:

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi: penyediaan rekomendasi kebijakan pembangunan dan/atau peningkatan kualitas, dan pembiayaan perumahan, penyediaan rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; 3. Penyediaan Rumah Layak Huni: pembangunan unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas, pembangunan rumah khusus, pembangunan rusun Penanganan Permukiman Kumuh;

No.	Arah Kebijakan	Strategi
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko; 5. Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6. Melakukan koordinasi dengan BUMN dan pihak swasta untuk dapat melaksanakan CSR di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 7. Melakukan sosialisasi program perumahan dan kawasan permukiman ke masyarakat secara langsung; dan 8. Melakukan kolaborasi/MoU dengan pihak di luar bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan Pelayanan (Perkantoran, Umum, Sarana Internal, Data dan Informasi, dan BMN); 2. Melakukan Sosialisasi Zona Integritas dan Manajemen Risiko ke pihak internal dan eksternal; 3. Meningkatkan pengetahuan pegawai internal BP3KP Sumatera V melalui sosialisasi; dan 4. Menyebarkan informasi kepada <i>stakeholder</i> bidang perumahan dan kawasan permukiman tentang program perumahan melalui sosialisasi berkala.

2.1.3. Sasaran Program

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V, maka disusun sasaran program BP3KP Sumatera V sebagai berikut:

- a. Meningkatnya hunian layak;
- b. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;

- c. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- d. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen BP3KP Sumatera V.

Sasaran Program BP3KP Sumatera V dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan. Berikut merupakan tabel penjabaran mulai dari Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan BP3KP Sumatera V.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan BP3KP Sumatera V

Sasaran Program		Kegiatan		Sasaran Kegiatan
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
1	Meningkatnya Hunian Layak	1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di BP3KP Sumatera V
		2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di BP3KP Sumatera V
		3	Penyediaan Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan layak huni
		4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan
2	Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	1	Penanganan Permukiman Kumuh	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3	Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1) Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman
				2) Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel
				3) Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP				
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BP3KP Sumatera V	1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan BP3KP Sumatera V	Meningkatnya layanan dukungan manajemen BP3KP Sumatera V

2.1.4. Program dan Kegiatan

BP3KP Sumatera V sebagai Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan dua program yaitu:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Program Dukungan Manajemen.

Berikut merupakan tabel program dan kegiatan di BP3KP Sumatera V.

Tabel 2. 2 Program dan Kegiatan BP3KP Sumatera V

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan									
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:									
1 Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi									
SASARAN PROGRAM:									
Meningkatnya Hunian Layak									
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4	-	-	-	-	4
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	0	1	1	1	1	4
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	3	3	3	3	15
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	-	4	4	4	4	16
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	50	1.558	1.558	1.558	1.558	6.282
	2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	333	333	333	333	1.332
	3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	1	1	1	3
	4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4
	6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	2.571	17.337	17.337	17.337	17.337	71.919
	2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	-	1.585	1.585	1.585	1.585	6.340
	3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	352	396	396	396	1.556
	4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan	-	1	1	1	1	4
	5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	4	-	-	-	-	4
	6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	-	1	1	1	1	4

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					TOTAL	
				2025	2026	2027	2028	2029		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		3	-	-	-	-	3	
10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	
11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan										
SASARAN KEGIATAN:										
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu									
SASARAN PROGRAM:										
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh										
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh										
SASARAN KEGIATAN:										
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar		-	34	40	20	-	94	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
SASARAN PROGRAM:										
Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN KEGIATAN:										
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	1	1	1	1	4	
SASARAN KEGIATAN:										
Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	
SASARAN KEGIATAN:										
Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman										
OUTPUT KEGIATAN:										
1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	
2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	
SASARAN STRATEGIS 2:										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS										
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman									
SASARAN PROGRAM:										
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V										

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					TOTAL
				2025	2026	2027	2028	2029	
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V									
SASARAN KEGIATAN:									
Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V									
OUTPUT KEGIATAN:									
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	4	4	4	4	20
	2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	4	4	4	4	20
	3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan	-	4	4	4	4	16
	4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	3	3	3	3	12
	5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	4	4	4	4	16
	6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	4	4	4	4	20
	7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	1	1	1	1	4
	12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	-	4	4	4	4	16

2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.2.1. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Sekretariat Jenderal

Pada bulan Agustus tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Sekretaris Jenderal sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Sekretariat Jenderal (Awal)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

Pada bulan Desember tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Sekretaris Jenderal sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Sekretariat Jenderal (Revisi Akhir)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

b. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Pada bulan Agustus tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Kawasan Permukiman sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Awal)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

Pada bulan Oktober tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Revisi I Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Kawasan Permukiman sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Revisi I)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

Pada bulan Desember tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Kawasan Permukiman sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (Revisi Akhir)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

c. Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

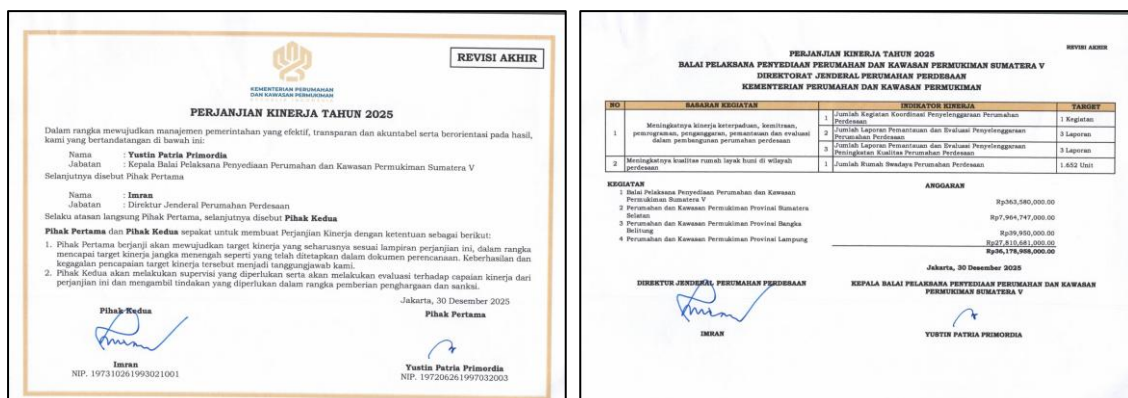
Pada bulan Agustus tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Awal)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

Pada bulan Desember tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (Revisi Akhir)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

d. **Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

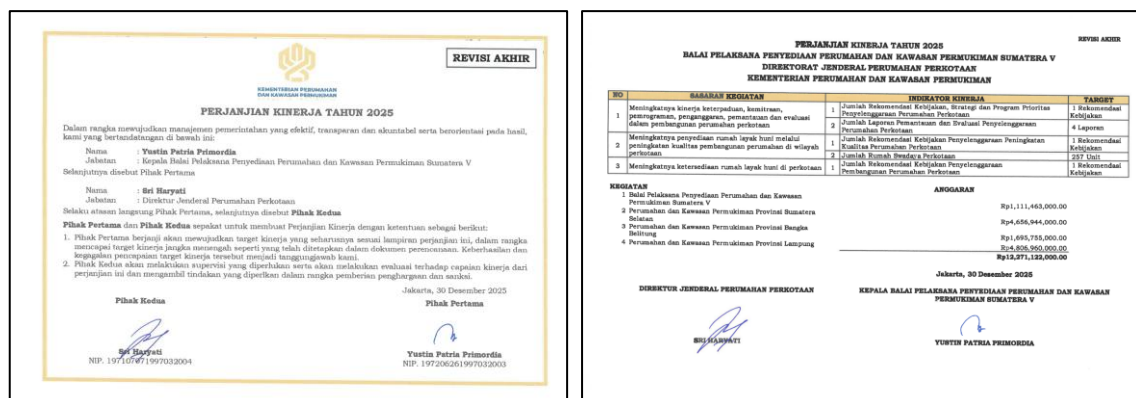
Pada bulan Agustus tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Awal)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

Pada bulan Desember tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Revisi Akhir Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (Revisi Akhir)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

e. **Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**

Pada bulan Agustus tahun 2025, Kepala BP3KP Sumatera V telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Pihak Pertama yaitu Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dengan pihak kedua yaitu Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebagaimana tertuang pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Awal)

Sumber: Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V Tahun 2025

2.2.2. Kronologi Perubahan PK DIPA Sekretariat Jenderal

PK DIPA Sekretariat Jenderal ditandatangani oleh Yustin Patria Primordia selaku Kepala BP3KP Sumatera V dan Didyk Choirel selaku Sekretaris Jenderal Kementerian PKP. PK DIPA Sekretariat Jenderal mengalami satu kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 3 Kronologi Perubahan PK DIPA Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
PK Awal	1 Agustus 2025	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan	Rp2.619.384.000
PK Revisi Akhir	30 Desember 2025	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan	Rp3.627.569.000

2.2.3. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

PK DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman ditandatangani oleh Yustin Patria Primordia selaku Kepala BP3KP Sumatera V dan Fitrah Nur selaku Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. PK DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mengalami dua kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 4 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
PK Awal	1 Agustus 2025	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Rp16.914.125.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	
PK Revisi-01	Oktober 2025	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Rp32.682.128.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.201 Unit	

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan	
		Jumlah Unit Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	58 Unit	
		Luas Penanganan Permukiman Kumuh	0,2 hektare	
PK Revisi Akhir	30 Desember 2025	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	Rp32.682.128.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	1.201 Unit	
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan	
		Jumlah Unit Pembangunan PSU	58 Unit	

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		Luas Penanganan Permukiman Kumuh	0,2 hektare	

2.2.4. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ditandatangani oleh Yustin Patria Primordia selaku Kepala BP3KP Sumatera V dan Imran selaku Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan. PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengalami satu kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 5 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
PK Awal	1 Agustus 2025	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	Rp31.557.772.000
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	
		Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1.435 Unit	
PK Revisi Akhir	30 Desember 2025	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	Rp36.178.958.000
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan	
		Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	1.6527 Unit	

2.2.5. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditandatangani oleh Yustin Patria Primordia selaku Kepala BP3KP Sumatera V dan Sri Haryati selaku Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan. PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mengalami satu kali perubahan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 6 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
PK Awal	1 Agustus 2025	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp4.520.436.600
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	70 Unit	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	
PK Revisi Akhir	30 Desember 2025	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp12.271.122.000
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	
		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	257 Unit	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	

2.2.6. Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) ditandatangani oleh Yustin Patria Primordia selaku Kepala BP3KP Sumatera V dan Aziz Adriansyah selaku Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. PK DIPA

Direktorat Jenderal TKPR mengalami perubahan satu kali sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 7 Kronologi Perubahan PK DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja	Tanggal Pengesahan PK	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
PK Awal	24 Juni 2025	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp303.466.000,00
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran BP3KP Sumatera V. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dikatakan bahwa pencapaian target diukur melalui perbandingan antara realisasi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berlaku terhadap pekerjaan fisik maupun penunjang di bidang

penyelenggaraan penyediaan perumahan yang berada di wilayah BP3KP Sumatera V.

2.4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

BP3KP Sumatera V memiliki 5 (lima) DIPA yang meliputi DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, serta DIPA Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Pada sub-bab ini pembahasan terbatas hanya DIPA pada satker Balai, tanpa membahas DIPA Satker di bawahnya. Berikut adalah penjelasan kronologis perubahan DIPA yang melekat pada masing-masing Unit Organisasi

2.4.1. Kronologis Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal (691390)

DIPA Sekretariat Jenderal dengan kode satker 691390, terdapat 6 (enam) kali revisi DIPA. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 115.014.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 1.096.625.000,- pada DIPA Revisi ke-6. Adapun rincian perubahan DIPA dapat dilihat sebagai berikut.



2.4.2. Kronologis Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691444)

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dengan kode satker 691444, terdapat 8 (delapan) kali revisi DIPA. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 50.000.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 470.994.000,- pada DIPA Revisi ke-8. Adapun rincian perubahan DIPA dapat dilihat sebagai berikut.



2.4.3. Kronologis Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691498)

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan kode satker 691498, terdapat 5 (lima) kali revisi DIPA. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 122.372.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 363.580.000,- pada DIPA Revisi ke-5. Adapun rincian perubahan DIPA dapat dilihat sebagai berikut.



2.4.4. Kronologis Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691552)

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan kode satker 691552, terdapat 7 (tujuh) kali revisi DIPA. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 100.000.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 363.580.000,- pada DIPA Revisi ke-7. Adapun rincian perubahan DIPA dapat dilihat sebagai berikut.



2.4.5. Kronologis Perubahan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (691599)

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan kode satker 691599, terdapat 5 (lima) kali revisi DIPA. Perubahan nilai pagu anggaran yang terjadi yaitu semula sebesar Rp 100.000.000,- pada DIPA Awal, menjadi Rp 363.580.000,- pada DIPA Revisi ke-5. Adapun rincian perubahan DIPA dapat dilihat sebagai berikut.



Bab III

Bab III

Bab III

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas kinerja diukur terhadap program yang telah disiapkan berdasarkan data pencapaian sasaran dari kegiatan yang direncanakan di tahun 2025, tingkat pencapaian terhadap kegiatan yang direncanakan serta realisasi keuangan untuk tahun yang bersangkutan.

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V merupakan Balai yang saat ini berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan pembaharuan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis sebelumnya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera V di bawah Direktorat Jenderal Perumahan.

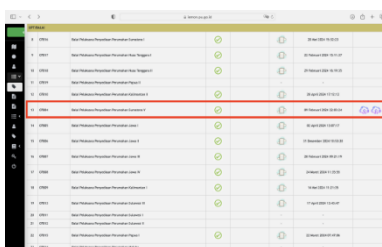
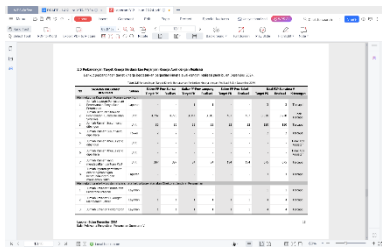

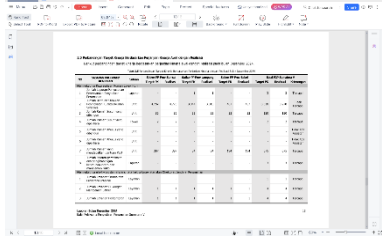
Implementasi atas AKIP BP2P Sumatera V Tahun 2024 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik), yang menunjukkan bahwa akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan pencapaian 72,65 dengan rincian per komponen sebagai berikut:

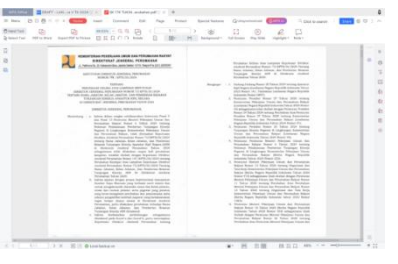
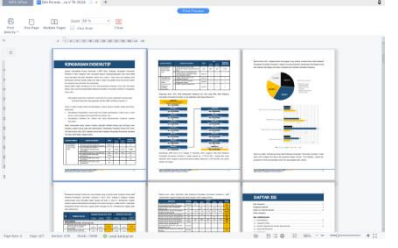
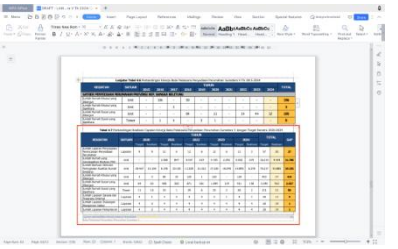
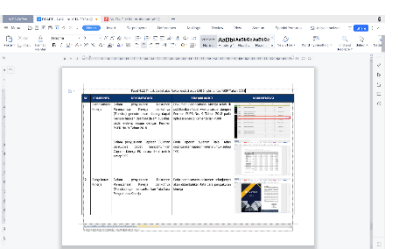
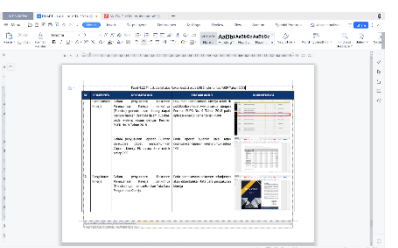
Tabel 3. 1 Target Kinerja Dukungan Manajemen di Balai P2P Sumatera V TA 2023

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,20
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,65
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	72,65

Berdasarkan pada hasil evaluasi tersebut, implementasi AKIP di lingkungan BP2P Sumatera V belum mencapai nilai maksimal sehingga terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BP3KP Sumatera V dan telah ditindaklanjuti, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2023 BP2P Sumatera V

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya (Renstra) periode akan datang dapat memperhatikan <i>deadline</i> dalam publikasi pada e-Sakip sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018	Dokumen Perencanaan Kinerja telah di publikasikan tepat waktu sesuai dengan Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 pada aplikasi e-Sakip Kementerian PUPR	
		Dalam penyusunan Laporan Bulanan berikutnya dapat mencantumkan Capaian Kinerja PK secara detail untuk setiap IKK	Pada laporan bulanan Balai telah dicantumkan capaian kinerja untuk setiap IKK	
2.	Pengukuran Kinerja	Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja berikutnya (Renstra) agar mencantumkan Tata Cara Pengukuran Kinerja	Pada perencanaan dokumen selanjutnya akan ditambahkan tata cara pengukuran kinerja	
		Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala (Laporan Evaluasi dan Monev Bulanan) dapat menuangkan capaian Kinerja PK secara detail untuk setiap IKK	Pada laporan evaluasi dan monev bulanan Balai telah dicantumkan capaian kinerja untuk setiap IKK	

No.	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
		Pengukuran Kinerja (SKP agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment (TUKIN 2024))	Pengukuran kinerja telah dijadikan sebagai dasar dalam pemberian Reward dan Punishment	
3.	Pelaporan Kinerja	Pada Laporan Kinerja periode berikutnya ringkasan eksekutif agar menggambarkan capain Kinerja, maupun hal-hal penting lainnya	Telah dijelaskan mengenai capaian kinerja maupun hal-hal penting lain didalam laporan kinerja	
		Pada Dokumen Laporan Kinerja berikutnya agar mencantumkan/ membandingkan target capaian kinerja secara total untuk setiap tahun pada periode Renstra	Dokumen laporan kinerja telah mencantumkan dan membandingkan target capaian kinerja secara total untuk setiap tahun pada periode Renstra	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menuangkan hasilnya dalam Laporan Kinerja	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dituangkan pada Laporan Kinerja	
		Dalam mengimplementasikan SAKIP dapat mengacu pada Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP	SAKIP telah diimplementasikan dengan mengacu pada Permen PUPR No. 9 Tahun 2018 dan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP telah ditindaklanjuti	

3.2. Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, Program Prioritas, Prioritas Nasional, Pantauan Kantor Staf Presiden

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V Tahun 2025 berisi hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Sumatera V selama periode Tahun Anggaran 2025 yang merujuk pada sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dasar pengukuran yaitu Perjanjian Kinerja dengan status revisi akhir.

LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh BP3KP Sumatera V dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di bawah 5 (lima) Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Kegiatan di lingkungan BP3KP Kalimantan I dilaksanakan dalam rangka mendukung dua program, yaitu:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Pada Tahun Anggaran 2025, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya melekat pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen hanya melekat pada DIPA Sekretariat Jenderal.

3.2.1. Capaian Kinerja terhadap PK Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja BP3KP Sumatera V dengan DIPA Sekretariat Jenderal menetapkan satu Sasaran Kegiatan yaitu: “Meningkatnya layanan dukungan manajemen” dengan satu indikator kinerja yaitu “Tingkat layanan dukungan manajemen” dan ditetapkan 4 Layanan sebagai target. Adapun capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025. Rincian Capaian Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Sekretariat Jenderal

No	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Dukungan Manajemen							
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal							
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	4	4	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Layanan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Layanan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Layanan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Layanan	1	1	100

3.2.2. Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sumatera V dengan DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yaitu:

- a. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni;
- b. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman;
- c. Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman; dan
- d. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu.

Sasaran Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang melekat pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025 dengan rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman							
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	4	4	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Laporan	1	1	100

No	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	mendukung penyediaan rumah layak huni	2	Jumlah Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	1.201	1.201	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Unit	300	300	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Unit	901	901	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Laporan	1	1	100
3	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	58	58	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Unit	58	58	100
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	Hektare	0,2	0,2	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Hektare	0,1	0,1	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Hektare	0,1	0,1	100

3.2.3. Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sumatera V dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu:

- a. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan; dan
- b. Meningkatnya kualitas rumah layak huni di kawasan perdesaan.

Sasaran Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang melekat pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun terdapat target kinerja yang tercapai tidak menyentuh angka maksimal yaitu pada Indikator Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan dengan capaian hanya 99,75%. Hal ini disebabkan adanya deviasi target kinerja sebesar -4 Unit Rumah Swadaya pada unit kerja Satker PKP

Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025, di mana target ditetapkan 1.296 unit namun hanya tercapai 1.292 unit. Sehingga capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan di BP3KP Sumatera V yaitu sebesar 99.75% pada Tahun Anggaran 2025. Adapun rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Laporan	1	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Laporan	1	1	100
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di kawasan perdesaan	1	Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	Unit	1.652	1.648	99,75
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Unit	356	356	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Unit	1.296	1.292	99,69

3.2.4. Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sumatera V dengan DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan;
- b. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan; dan
- c. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni di perkotaan.

Sasaran Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang melekat pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025 dengan rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan							
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	1	1	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Laporan	1	1	100
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
		2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	257	257	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Unit	10	10	100
			Satker PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Unit	50	50	100
			Satker PKP Provinsi Lampung	Unit	197	197	100
3	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di kawasan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
			Satker BP3KP Sumatera V	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
		2	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	44	44	100
			Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	Unit	44	44	100

3.2.5. Capaian Kinerja terhadap PK Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Perjanjian Kinerja pada BP3KP Sumatera V dengan DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel; dan
- b. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran Kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja yang melekat pada masing-masing sasaran kegiatan. Adapun capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebesar 100% pada Tahun Anggaran 2025 dengan rincian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja BP3KP Sumatera V pada PK Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel n	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
		Satker BP3KP Sumatera V	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
		Satker BP3KP Sumatera V	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

BP3KP Sumatera V menetapkan tujuan organisasi sebagai landasan operasional pelaksanaan program di wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung yang mengacu pada arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029. Tujuan ini dirancang untuk memastikan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pertama yaitu peningkatan akses

hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif dan tujuan kedua yaitu peningkatan kualitas tata kelola.

Dalam memastikan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BP3KP Sumatera V selama Tahun Anggaran 2025 dapat mencapai tujuan terwujudnya hunian layak yang diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dilakukan analisis perbandingan kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai berikut.

3.3.1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, eks. Direktorat Jenderal Perumahan dibentuk pada tahun 2020 dan kegiatan dimulai pada tahun bersamaan. Namun, pada tahun 2020, DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V masih bergabung dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga target pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dimulai pada tahun 2021.

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V eks. Direktorat Jenderal Perumahan terdapat cukup banyak perubahan dikarenakan kondisi setiap tahunnya baik program dan kegiatan hingga penganggaran. Perbandingan capaian pada tahun 2020 hingga 2024 pada wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V, eks. Direktorat Jenderal Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V tahun 2025, dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 3. 8 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2021-2025

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	6	6	6	3	-
Jumlah Rumah yang mendapatkan Bantuan PSU	Unit	847	619	2.293	675	58
Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	7.220	12.332	10.035	8.278	3.106
Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	34	1	-	-	-
Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	16	-	-

KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	320	261	119	150	44
Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	1	6	2	2	-
Luas Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	-	-	0,2
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	-	-	-	-	1
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	-	-	-	-	4
Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	-	-	-	-	1
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	-	3
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	-	3
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	-	-	-	-	4
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	1
Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	2	3	2
Tingkat layanan dukungan manajemen	Layanan	-	-	-	-	4

3.3.2. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Target kinerja jangka menengah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V telah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis BP3KP Sumatera V Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dalam kurun waktu 2025-2029.

Tabel 3. 9 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V TA 2025

Kegiatan/Sasaran/ Rincian/Output	Satuan	Target pada Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	GAP
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi				
Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	4	1	3
Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	1	1	-
Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	3	3	-
Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	-	4	4
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum				
Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	50	58	8
Penyediaan Rumah Layak Huni				
Jumlah unit rumah swadaya	Unit	2.571	3.106	35
Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	16	44	8
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan	4	4	-
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan	3	3	-
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan	-	3	3
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-
Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-

Kegiatan/Sasaran/ Rincian/Output	Satuan	Target pada Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	GAP
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V				
Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	4	-
Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	-	4
Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan	4	-	4

3.3.3. Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V Tahun 2025 dengan Organisasi Sejenis yang Setara

Dalam upaya melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap hasil kerja guna meningkatkan kualitas kinerja di waktu mendatang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V melakukan perbandingan kinerja dengan capaian organisasi sejenis yang setara indikator kegiatannya. BP3KP Sumatera III menjadi referensi perbandingan dalam mengevaluasi capaian kinerja BP3KP Sumatera V pada tahun 2025. Perbandingan tersebut dilakukan karena BP3KP Sumatera V dan BP3KP Sumatera III berkontribusi terhadap pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keduanya juga memiliki kesamaan dari segi cakupan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) provinsi.

Tabel 3. 10 Perbandingan Kinerja BP3KP Sumatera V dengan BP3KP Sumatera III TA 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	BP3KP Sumatera V			BP3KP Sumatera III			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sekretariat Jenderal								
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen								
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	4	4	100	4	4	100
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100	1	1	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Satuan	BP3KP Sumatera V			BP3KP Sumatera III		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100	4	4	100
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								
1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektare	0,2	0,2	100	103,72	103,72	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman								
1	Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	Unit	1.201	1.201	100	10	10	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100	3	3	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100	3	3	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	Unit	16.52	1.648	99,75	897	894	99,67
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan								
1	Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	Unit	-	-	-	140	140	100
2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	-	-	-	1	-*	-*
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100	4	4	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	BP3KP Sumatera V			BP3KP Sumatera III		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	Unit	257	257	100	248	247	99,60
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan							
1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	2	2	100
2 Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	-	-	-	102	102	100
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
2 Jumlah Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100

Sepanjang tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera V dan BP3KP Sumatera III telah mengoptimalkan seluruh sumber daya guna mencapai target kinerja yang maksimal. Secara umum, kedua instansi tersebut berhasil merealisasikan target dalam Perjanjian Kinerja, dengan pengecualian pada indikator jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Adapun dari sisi perbandingan struktur kegiatan, terdapat perbedaan pada dua indikator kinerja, di mana BP3KP Sumatera III memiliki tanggung jawab tambahan berupa pembangunan rumah khusus dan rumah susun pada periode tahun 2025.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran pada Unit Kerja BP3KP Sumatera V

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-8 BP3KP Sumatera V Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tanggal 12 Desember 2025, BP3KP Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp 470.994.000,-. Hingga bulan Desember 2025, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 461.625.549,- atau sekitar 98,01% dari target.

Tabel 3. 11 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman					
1	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	420.994.000	415.907.281	98.79%	5.086.719
	Pemantauan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	90.694.000	87.030.010	95.96%	3.663.990
	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	328.877.271	328.877.271	99.57%	1.422.729
2	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	50.000.000	45.718.268	91.44%	4.281.732
	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000	45.718.268	91.44%	4.281.732
TOTAL		470.994.000	461.625.549	98.01%	9.368.451

3.4.2. Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-07 BP3KP Sumatera V Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tanggal 13 Desember 2025 BP3KP Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp 1.111.463.000,-. Hingga bulan Desember 2025, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 1.012.785.988,- atau sekitar 91,12% dari target.

Tabel 3. 12 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	884.491.000	801.609.115	90.63%	82.811.885

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)
	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	380.786.000	365.569.196	96.00%	15.216.804
	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	190.300.000	151.134.940	79.42%	39.165.060
	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	313.405.000	284.904.979	90.91%	28.500.021
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	226.972.000	211.176.873	93.04%	15.795.127
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	226.972.000	211.176.873	93.04%	15.795.127
TOTAL		1.111.463.000	1.012.785.988	91.12%	98.677.012

3.4.3. Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-05 BP3KP Sumatera V Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan tanggal 12 Desember 2025 BP3KP Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp 363.580.000,-. Hingga bulan Desember 2025, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 257.398.926,- atau sekitar 70,80% dari target.

Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
1	Koordinasi	217.536.000	137.087.670	63.02%	80.448.330
	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	217.536.000	137.087.670	63.02%	80.448.330
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	146.044.000	120.311.256	82.38%	25.732.744
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	146.044.000	120.311.256	82.38%	25.732.744

TOTAL	363.580.000	257.398.926	70.80%	106.181.074
-------	-------------	-------------	--------	-------------

3.4.4. Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-05 BP3KP Sumatera V Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tanggal 28 November 2025 BP3KP Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp 303.466.000,-. Hingga bulan Desember 2025, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 293.857.485,- atau sekitar 96,83% dari target.

Tabel 3. 14 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	303.446.000	293.857.485	96.83%	9.608.515
	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	129.233.000	126.998.870	98.27%	2.234.130
	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	174.233.000	166.858.615	95.77%	7.347.385
TOTAL		303.466.000	293.857.485	96.83%	9.608.515

3.4.5. Realisasi Anggaran BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Sekretariat Jenderal

Berdasarkan DIPA Revisi Ke-05 BP3KP Sumatera V Direktorat Jenderal Sekretariat Jenderal tanggal 12 Desember 2025 BP3KP Sumatera V memiliki anggaran total sebesar Rp 1.096.625.000,-. Hingga bulan Desember 2025, anggaran yang berhasil diserap oleh balai adalah sebesar Rp. 1.052.255.334,- atau sekitar 95,95% dari target.

Tabel 3. 15 Perbandingan Target dan Realisasi BP3KP Sumatera V terhadap DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal					
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.096.625.000	1.052.255.334	95.95%	44.369.666
	Layanan Perkantoran	1.096.625.000	1.052.255.334	95.95%	44.369.666
TOTAL		1.096.625.000	1.052.255.334	95.95%	44.369.666

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.5.1. Sumber Daya Manusia

Berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di BP3KP Sumatera V Tahun 2025. Rasio penugasan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Penugasan} = (5/\text{Total Pegawai}) \times \text{Jumlah Kegiatan}$$

Tabel 3. 16 Rasio Penugasan di BP3KP Sumatera V

No	Unit Kerja/Satker	Pagu (Rp Ribu)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Pegawai	Rasio Penugasan/Orang	Pagu (Rp Ribu)/Orang
1.	BP3KP Sumatera V	3,346,128,000	12	37	1,62	90,435,892
2.	Satker PKP Provinsi Sumatera Selatan	17,527,022,000	10	34	1,47	515,500,647
3.	Satker PKP Provinsi Lampung	53,213,580,000	8	32	1,25	1,662,924,375
4.	Satker PKP Provinsi Kep. Bangka Belitung	10,976,513,000	7	20	1,75	548,825,650
JUMLAH		85,063,243,000	37	123		

Berdasarkan tabel rasio penugasan di atas, diasumsikan 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh 5 orang maka rasio penugasan untuk BP3KP Sumatera V dan dimasing-masing Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Satker PKP) adalah 1 penugasan. Maka dari itu diperlukan pendistribusian ulang jumlah pegawai ataupun penambahan pegawai pada bidang tersebut untuk menjaga keseimbangan beban kerja di BP3KP Sumatera V dan masing-masing Satuan Kerja.

Selain itu, terdapat permasalahan lain yang dihadapi BP3KP Sumatera V diantaranya:

- a. Kurangnya pegawai bidang administrasi sehingga beberapa pegawai dengan latar belakang pendidikan teknis harus memiliki beban kerja ganda untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada bidang administrasi dan umum; dan
- b. Ketidakseimbangan jumlah pegawai dengan jumlah kegiatan yang membuat beban kinerja yang harus ditanggung oleh pegawai melebihi standar sehingga diperlukan distribusi beban kerja yang lebih merata kepada pegawai sesuai dengan kemampuan teknis yang dimiliki.

3.5.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di BP3KP Sumatera V diantaranya:

1. Bangunan kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Jalan Inspektur Yazid No. 4290 KM 2,5 Kota Palembang. Terletak di lantai 1 pada bangunan 2 lantai dengan luas keseluruhan 328m².

Tabel 3. 17 Analisis Kebutuhan Ruang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V

Peruntukan Ruang	Luas Ruang	Jumlah Orang	Total Kebutuhan Ruang (m ²)
Ruang Kepala Balai	117	1	117
Ruang Kasubbag Umum dan Tata Usaha	11	1	11
Ruang Kasi Wilayah I	11	1	11
Ruang Kasi Wilayah II	11	1	11
Ruang PPK Satker Balai	11	1	11
Ruang Staf	5	35	175
Ruang Rapat	73	-	73
Ruang Penyimpanan (Gudang)	24	-	24
Ruang Pelayanan Publik	20	-	20
Lobby dan Fasilitas Lain	50	-	50
Sirkulasi	25%		117
TOTAL			620

Setelah dilakukan analisis kebutuhan ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V membutuhkan luas ruangan dengan ukuran 620,00m² untuk dapat menampung 37 orang pegawai. Sehingga, dari luasan kantor eksisting saat ini, masih dibutuhkan luas ruangan 292m² untuk memenuhi kebutuhan luasan ruangan yang sesuai dengan standar dan

ketentuan. Terdapat penambahan jumlah kebutuhan luas ruangan dengan bertambahnya jumlah pegawai CPNS yang bertugas di BP3KP Sumatera V pada tahun 2025.

2. Ketersediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2025, seperti komputer/laptop, printer, scanner maupun furnitur (meja, kursi dan lemari) sudah memiliki jumlah yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V dan juga mendukung kinerja Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera V. Namun, diperlukan perawatan berkala terhadap sarana dan prasarana yang ada, sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di BP3KP Sumatera V.

3.6. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

3.6.1. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Sebagai upaya dalam menyajikan informasi realisasi kinerja yang sesuai dengan kondisi terkini, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, melakukan penandatanganan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan para Kepala Satuan Kerja di wilayah kerja balai yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung. Selain itu juga disusun Berita Acara Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V yang memuat perbandingan target akhir dan capaian kinerja hingga tanggal 31 Desember 2025 dan ditanda tangani oleh Kepala Balai dan para Kepala Satuan Kerja.

3.6.2. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung telah mengikuti Bimbingan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada kegiatan ini pegawai mendapatkan informasi terkait capaian kinerja dan

konsep penyusunan laporan kinerja tahun 2025. Selain itu, terus dilakukan koordinasi dengan para pegawai mengenai capaian kinerja baik di balai maupun capaian pada satuan kerja yang merupakan bagian dari capaian balai.

3.6.3. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala

Selama tahun 2025, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V menyelenggarakan rapat bulanan. Pada rapat tersebut, dibahas mengenai beberapa hal dan salah satunya adalah mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang berpengaruh pada capaian kinerja. Rapat ini dihadiri oleh staf Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Bangka Belitung, yang dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring).

3.6.4. Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja Berkala

Pada tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V telah melaksanakan beberapa kali revisi anggaran terhadap 5 DIPA yang dimiliki. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan anggaran yang perlu disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pagu anggaran awal yang tercantum pada 5 DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V adalah sebesar Rp432.386.000,- yang hingga revisi akhir mencapai Rp3.346.128.000,-.

3.6.5. Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Indikator pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V saat ini dibandingkan dengan 2 (dua) target kinerja yaitu berdasarkan pada target jangka pendek yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya dan target jangka menengah pada

Renstra 2025-2029. Bila dilihat dari capaian kinerja balai pada tahun-tahun sebelumnya, kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V berhasil mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun berjalan namun belum dapat mencapai target sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target Renstra 2020-2024 dengan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V. Pada tahun 2025, telah disusun Renstra 2025-2029. Realisasi pada tahun 2025 dapat mencapai target pada Renstra 2025-2029 dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

3.6.6. Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Berdasarkan pada hasil evaluasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, terdapat beberapa rekomendasi penyesuaian pada dokumen perencanaan. Salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut adalah mencantumkan Tata Cara Pengukuran Kinerja pada dokumen perencanaan. Rekomendasi ini telah ditindak lanjuti pada penyusunan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

3.6.7. Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Selama tahun 2025, dilaksanakan rapat bulanan yang membahas mengenai beberapa hal, salah satunya mengenai pelaksanaan dan capaian kinerja pada balai serta satuan kerja. Pada kegiatan-kegiatan yang memerlukan perhatian khusus, dilaksanakan rapat tersendiri yang membahas lebih detail mengenai permasalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antara balai dan satuan kerja terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan capaian kinerja.

3.7. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

3.7.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

Selama Tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V, melaksanakan kegiatan berdasarkan pada 5 (lima) DIPA pada masing-masing unit kerja di Kementerian PKP yang terdiri dari 18 indikator kinerja kegiatan. Dari 18 indikator yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BP3KP Sumatera V, 17 indikator dapat dilaksanakan secara maksimal mendukung keberhasilan kinerja dan mendapatkan capaian kinerja dengan nilai 100%. Berikut indikator kinerja yang mencapai kinerja maksimal.

Tabel 3. 18 Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V yang Mencapai 100%

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman		
1.	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	100%
2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	
1.	Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	100%
2.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	100%
3.	Meningkatnya perencanaan, fasilitas penyiapan lahan dan pemenuhan rumah yang terlayani PSU kawasan permukiman	
1.	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%
4.	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	
1.	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	
1.	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	100%
2.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	100%
3.	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perkotaan	
1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	100%

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja
	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	100%
2.	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	100%
	2. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	100%
3.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di perkotaan	
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	100%
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	
	1. Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	100%
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	
	1. Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	100%
Sekretariat Jenderal		
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen	
	1. Tingkat layanan dukungan manajemen	100%

Dari beberapa indikator kegiatan pada BP3KP Sumatera V, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak mencapai kinerja 100% dan menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja balai. Indikator tersebut adalah Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan. Capaian kinerja kegiatan ini adalah 99,75% dengan target pelaksanaan kegiatan yaitu 1.652 unit namun realisasi hanya 1.648 unit. Terdapat 4 unit bantuan tidak terlaksana yang disebabkan oleh beberapa hal seperti Calon Penerima Bantuan (CPB) yang mengundurkan diri karena ketidakmampuan untuk berswadaya dan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang telah meninggal dunia.

Tabel 3. 19 Indikator Kinerja BP3KP Sumatera V yang Tidak Mencapai 100%

No.	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		
1.	Meningkatnya kualitas rumah layak huni di wilayah perdesaan	
	1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	99,75%

Bab IV
Bab IV
Bab IV

Penutup



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3KP Sumatera V Tahun 2025 merupakan perwujudan tanggung jawab Kepala BP3KP Sumatera V kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kepada masyarakat (publik) selaku penerima manfaat. Laporan ini mempertanggungjawabkan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah kerja Balai (Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung).

Tujuan strategis keberadaan BP3KP Sumatera V adalah untuk mengakselerasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan bahwa pemenuhan rumah layak huni harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, serta kecukupan standar luasan minimal sebagai hak dasar setiap warga negara.

4.1. Simpulan Umum

Secara keseluruhan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3KP Sumatera V Tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat baik dalam memenuhi target-target strategis nasional di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah isu strategis tingginya angka *backlog* perumahan serta kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian layak, BP3KP Sumatera V berhasil menunjukkan komitmen nyata dalam mengakselerasi penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran (fiskal) dan tantangan kuantitas SDM, efektivitas koordinasi serta inovasi sistem digitalisasi terbukti mampu menjaga integritas pencapaian kinerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

4.1.1. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Perencanaan yang Tepat Sasaran dan Terukur
Adanya keselarasan antara Renstra, RPJMN 2025–2029, serta Perjanjian Kinerja menjadikan target yang ditetapkan lebih terfokus, realistis, dan dapat diukur dengan jelas. Keselarasan Renstra dengan RPJMN 2025–2029 memastikan target tetap fokus pada pengurangan *backlog*.
2. Komitmen Pimpinan dan Keterlibatan *Stakeholder*
Sinergi dengan Pemerintah Daerah menjadi kunci utama dalam memitigasi keterbatasan peran Balai di lapangan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Digitalisasi
Penggunaan aplikasi seperti *myPKP*, SIBARU, *E-Office*, dan lain-lain memperkuat transparansi, efektivitas pengelolaan data, serta pelayanan publik secara *real-time*.
4. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan Masyarakat
Program bantuan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dirancang berdasarkan kondisi riil masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), sehingga tingkat penerimaan masyarakat sangat tinggi.
5. Evaluasi Internal yang Aktif dan Responsif
Monitoring mingguan dan evaluasi berkala memungkinkan penyesuaian strategi secara cepat saat ditemukan kendala teknis.

4.1.2. Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam penyelenggaraan kegiatan, BP3KP Sumatera V tidak luput dari permasalahan-permasalahan baik dalam administrasi, teknis, maupun progress lapangan. Salah satu faktor utama keberhasilan pencapaian kinerja adalah strategi dalam penanganan permasalahan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Adapun kendala yang dihadapi BP3KP Sumatera V adalah :

1. Penerima Bantuan meninggal dunia sebelum kegiatan/program selesai.
2. Penerima Bantuan mengundurkan diri dikarenakan PB mendapatkan bantuan lainnya.
3. Penerima Bantuan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah SK terbit, dikarenakan berbagai alasan dan pertimbangan.

4. Terkendala keswadayaan dan waktu pelaksanaan, dan
5. Penerima bantuan tidak dapat menunjukkan surat legalitas tanah yang sah disebabkan oleh sengketa tanah.
6. Kondisi lapangan yang sulit diakses pada kawasan permukiman padat serta faktor cuaca ekstrem di wilayah Sumatera V sering kali menghambat mobilisasi material dan pengerjaan fisik infrastruktur sanitasi maupun jalan lingkungan.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya meminimalisir kendala permasalahan dan hambatan yang menjadi faktor ketidakberhasilan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun lembar DIPA, tindak lanjut yang dilaksanakan BP3KP Sumatera V di TA 2025 atas permasalahan di atas, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal untuk mempercepat penerbitan SK Perubahan bagi Calon Penerima Bantuan (CPB) pengganti, guna mengisi kuota dari penerima yang meninggal dunia atau mengundurkan diri.
2. Menyesuaikan jadwal mobilisasi material dan metode kerja pada kawasan padat serta melakukan percepatan kontrak di awal tahun untuk menghindari puncak musim hujan.
3. Melakukan re-distribusi beban kerja dan penambahan personel verifikasi teknis untuk mengatasi keterbatasan SDM Balai dalam pengawasan proyek fisik (BSPS, Sanitasi, dan PSU).
4. Berkoordinasi dengan pengusul dan perangkat daerah (BPN/Dinas Pertanahan) untuk melakukan pra-verifikasi status tanah sebelum penetapan lokasi, guna menghindari sengketa di tengah masa konstruksi.

Merujuk pada isu strategis dan evaluasi kinerja, langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah:

1. Mengingat keterbatasan anggaran APBN, BP3KP Sumatera V harus bertransformasi menjadi mediator yang aktif menjembatani kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta (melalui skema CSR), dan

lembaga pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan inovasi pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi MBR.

2. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi (seperti SIBARU dan myPKP) tidak hanya untuk monitoring internal, tetapi juga untuk menyelaraskan data backlog dengan Pemerintah Daerah agar intervensi (BSPS, PSU, dan Sanitasi) tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
3. Melaksanakan program pengembangan kompetensi dan sertifikasi secara berkala bagi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar memiliki kemampuan teknis dan kemampuan mediasi sosial yang lebih kuat, terutama dalam mendorong keswadayaan masyarakat.
4. Mendorong konsep pembangunan kawasan yang terintegrasi (paving, sanitasi, dan rumah layak huni dalam satu skema perencanaan) guna memastikan dampak peningkatan kualitas lingkungan lebih signifikan dan berkelanjutan.
5. Menyusun mekanisme serah terima aset dan pendampingan pengelolaan pasca-pembangunan kepada Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat, guna memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap terpelihara dan berfungsi optimal secara jangka panjang.

Keberhasilan atas pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada beberapa indikator kinerja tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur BP3KP Sumatera V yang telah diselesaikan di TA 2025, kiranya dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama penerima bantuan.



**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera V**

2025